

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH PUBLIKASI

Naskah publikasi dengan judul:

**Upaya Islamic Relief Worldwide (IRW) dalam Krisis Kemanusiaan Etnis Rohingya
Pada Konflik Myanmar**

Nuurul Luthfiyyah
20140510380

Yang Menyetujui



Sidra Ahmadi, S.IP., M.A
Dosen Pembimbing

**Upaya Islamic Relief Worldwide (IRW) dalam Krisis Kemanusiaan Etnis
Rohingya Pada Konflik Myanmar**

Nuurul Luthfiyyah

Sidiq Ahmadi., S.IP., M.A.

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Abstract

This study is to find out the efforts of Islamic Relief Worldwide (IRW) as a Non-Government Humanitarian Institution in helping the Rohingya Ethnic Humanitarian Crisis in the Myanmar Conflict. It has been known that Rohingya ethnic groups received discriminatory treatment carried out by the majority ethnic groups in Myanmar and were also driven by the government in 2012. Islamic Relief Worldwide as a humanitarian institution was immediately alert in responding to the conflict that hit the Rohingya ethnic group. This analysis will show how the response and strategies applied by Islamic Relief in an effort to help Rohingya ethnicity. In this study, Islamic Relief will act as an NGO (Non Governmental Organization) which conducts humanitarian actions in helping Rohingya ethnic groups and applies the Transnational Advocacy Network (TAN) concept in its strategy.

Key Word: Rohingya, Islamic Relief Worldwide, Non Governmental Organization, Humanitarian actions, Transnational Advocacy Network

Pendahuluan

Tahun 2012 lalu, dunia dikejutkan oleh fenomena banyaknya kapal yang berisi manusia terombang ambing di lautan lepas. Orang-orang di dalam kapal tersebut diketahui merupakan mayoritas etnis Rohingya yang melarikan diri dari tanahnya sendiri karena diperlakukan penuh kekerasan. Hal ini pun seketika menyedot perhatian dunia. Seluruh mata pun tertuju kepada Negara Myanmar selaku Negara asal etnis Rohingya. Tak lama terkuaklah bahwa telah terjadi krisis kemanusiaan besar-besaran di negara Myanmar yang menimpa etnis Rohingya. Etnis Rohingya ini sebenarnya telah

menjadi etnis ‘terbuang’ sejak berpuluh tahun lalu tepatnya tahun 1948 pada saat Myanmar medeka dari Inggris. Hal tersebut karena Myanmar menganggap etnis Rohingya sebagai kaum pendatang bukan penduduk asli sehingga mereka tidak layak mendapatkan status sebagai warga negara Myanmar.

“Pada fakta sebenarnya, meskipun terdapat (135) ras nasional yang hidup di Myanmar, yang disebut orang Rohingya bukanlah salah satu dari mereka. Secara sejarah, disana tidak pernah ada ras Rohingya di Myanmar. Sesungguhnya nama Rohingya merupakan ciptaan sebuah kelompok pemberontak di wilayah Rakhine. Sejak perang pertama Myanmar kuno pada tahun 1842, orang berkeyakinan Muslim dari negara perbatasan secara illegal masuk ke Myanmar Ngain-ngan, terutama di wilayah Rakhine. Menjadi imigran illegal mereka tidak memegang kertas imigrasi seperti orang negara nasional lainnya” (Alternative ASEAN Network on Burma, 2006).

Kebijakan Myanmar tersebut menyebabkan terjadinya perlakuan diskriminasi terhadap etnis Rohingya oleh banyak kalangan di Myanmar. Banyak terjadi upaya pengusiran terhadap etnis Rohingya yang bersifat kekerasan seperti pembakaran rumah, pemerkosaan, pengambilan hak milik secara paksa, penyiksaan bahkan pembunuhan. Amnesty International mencatat pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan terhadap etnis Rohingya pada tahun 1978 menyebabkan sekitar 200.000 orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh karena pemberlakuan operasi Nagamin oleh Junta Militer (Amnesty International, 2004). Operasi ini dilakukan dalam upaya memeriksa setiap individu yang berada di Myanmar, mendokumentasikan status kewarganegaraan, serta daftar orang-orang yang memasuki Myanmar secara ilegal (Human Rights Watch/Asia, 1996). Data diatas menunjukkan bahwa perlakuan buruk terhadap etnis Rohingya tidak hanya dilakukan oleh kaum etnis mayoritas di Myanmar namun juga dimotori oleh pemerintah yang melakukan kekerasan semena-mena dengan didasari alasan untuk memburu etnis Rohingya yang berstatus imigran illegal. Perlakuan diskriminatif tersebut pun terus terjadi terhadap etnis Rohingya selama berpuluh tahun kemudian hingga puncaknya pada tahun 2012. Dimana pada Mei 2012, terjadi sebuah kejadian yang meyulut api konflik antara etnis Rakhine dan etnis Rohingya yang berujung pada penyiksaan terhadap etnis Rohingya dan menyebabkan banyak korban berjatuhan.

Tragedi tersebut bermula dari tuduhan pembunuhan yang dilakukan oleh beberapa pria dari etnis Rohingya terhadap seorang gadis Rakhine bernama Ma Thida Htwe. Beberapa isu buruk berkembang luas di masyarakat Rakhine sehingga memicu kemarahan terhadap etnis Rohingya. Situasi pun semakin buruk ketika beredarnya foto forensik jasad gadis tersebut yang menunjukkan metode pembunuhan yang dilakukan oleh pria Rohingya tersebut. Foto tersebut pun membakar amarah warga yang kemudian melampiaskan amarahnya dengan menyerang sebuah bus di persimpangan Thandwe-Taungpup dan membunuh sepuluh orang penumpang beragama Islam di dalamnya. Kejadian tersebut pun semakin memperuncing ketidaksukaan mereka terhadap etnis Rohingya. Kekejaman terhadap etnis Rohingya semakin sering dilakukan dengan dalih bahwa mereka bukan bagian dari negara Myanmar. Bahkan seorang biksu Budha yang fotonya tenar di sosial media menyerukan untuk menghalau bantuan kemanusiaan untuk etnis Rohingya, “Rohingya no” (Nugroho, 2012). Data Human Right Watch menyebut antara 2012 hingga 2014 ada 300 ribu warga Muslim Rohingya terusir dari Myanmar. Tahun 2012, muncul gerakan *Rohingya Elimination Group* yang didalangi oleh kelompok ekstremis 969. Tak kurang dari 200 jiwa dan 140.000 warga Rohingya lainnya dipaksa tinggal di kamp-kamp konsentrasi yang tidak manusiawi (Bhawono, 2017). Keadaan tersebut pun memaksa banyak diantara mereka melarikan diri dari Myanmar untuk mencari perlindungan dan kehidupan yang lebih baik. Banyak pengungsi yang mencari perlindungan menuju negara-negara lain dengan alat transportasi seadanya bahkan mayoritas menggunakan perahu kayu biasa sehingga kemudian dikenal dengan sebutan “manusia perahu”. Banyak diantara mereka memilih mengungsi ke negara terdekat seperti Bangladesh, Indonesia, Malaysia, Australia, dsb.

Kondisi yang sangat memprihatinkan tersebut sangat menarik perhatian dunia Internasional. Banyak kalangan pun mulai bersimpati dan membahas secara khusus kondisi etnis Rohingya yang tidak memiliki kejelasan statusnya tersebut sehingga mengalami perlakuan diskriminatif. Kondisi kehidupan mereka yang penuh penyiksaan dan kekejaman dari puluhan tahun lalu hingga sekarang baik dari kaum mayoritas maupun pemerintah membuat banyak negara dan lembaga kemanusiaan termasuk Islamic Relief Worldwide tergerak untuk memberikan bantuan.

Islamic Relief Worldwide sebagai lembaga kemanusiaan Islam langsung sigap dalam menanggapi konflik yang menimpa etnis Rohingya tersebut. Islamic Relief mulai membantu etnis Rohingya pada tahun 2012. Pada tahun tersebut, mereka membantu sekitar 100.000 umat Buddha dan Muslim sebagai korban kekerasan antar-komunal menyapu negara Rakhine. Bantuan tanggap darurat tersebut meliputi distribusi makanan, tempat tinggal, dan pemasangan sumur, kakus dan toilet (Myanmar). Selain itu Islamic Relief juga membantu pengungsi Rohingya yang melarikan diri ke berbagai negara tetangga dengan mengerahkan lembaga cabang Islamic Relief di berbagai negara lainnya. Islamic Relief Malaysia (IRM) terus mengirim misi bantuan khusus untuk pengungsi Rohingya di Cox's Bazaar, Bangladesh meskipun negara itu akan mulai mengirim pengungsi pulang ke Myanmar. IRM menetapkan target untuk menyiapkan empat sumur air bersih di Cox's Bazaar. Islamic Relief juga aktif bekerja untuk mengimplementasikan lebih banyak program dan distribusi bantuan darurat untuk membantu mereka yang terkena dampak konflik dan kekerasan yang sedang berlangsung di wilayah tersebut (Myanmar - Islamic Relief USA).

Islamic Relief Worldwide

Bencana kelaparan yang terjadi di Afrika pada tahun 1980-an telah mengguncang dunia. Pertanian yang memprihatinkan menjadi penyebab awal dari kelaparan yang merajalela di Afrika. Pemerintah setempat tidak dapat membantu banyak dikarenakan karena ketidakmampuan serta situasi negara yang penuh konflik. Pihak barat yang dipercaya mempunyai kekuatan dan kekuasaan lebih dalam membantu berbagai permasalahan pun enggan untuk membantu karena khawatir dana bantuan yang ditujukan akan disalahgunakan untuk membiayai perang sipil. Pada bulan maret pemerintah Euthopia memperingatkan bahwa terdapat 5 juta orang beresiko menderita kelaparan karena negara hanya bisa menghasilkan 6,2 juta ton beras per tahunnya, satu juta lebih sedikit dari yang dibutuhkan. Ketika musim kemarau ribuan orang meninggal karena kelaparan dan terkena penyakit. Lembaga bantuan mengatakan terdapat 6 juta orang terkena resiko tersebut (Milner, 2000). Kondisi Afrika yang sangat membutuhkan bantuan tersebut membuat berbagai kalangan di seluruh dunia turun tangan meberikan bantuan. Dr Hany El-Banna beserta teman-temannya dari Universitas Birmingham merasa empati terhadap krisis tersebut dan ikut bergerak membantu

bencana tersebut. Aksi mereka diawali dengan berkeliling dari rumah ke rumah dan masjid ke mesjid untuk meminta bantuan berupa uang. Lalu uang yang terkumpul tersebut digunakan untuk membeli makanan guna diberikan kepada orang-orang yang terkena kelaparan. Gerakan sederhana inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Islamic Relief Worldwide. Pada tahun 1985, proyek pertama Islamic Relief adalah memnspnsori sebuah peternakan ayam di Sudan. Pada tahun yang sama, Hany El-Banna menyewa sebuah kantor kecil di Moseli, Birmingham dan dari sana terkumpul £100.000 untuk membantu krisis kelaparan. *Islamic Relief Worldwide* berkembang sangat pesat, dan lima tahun kemudian, Islamic Relief memulai kegiataannya di Mozambique, Iran, Pakistan, Malawi, Iraq, dan Afghanistan, beserta lainnya, merespon keadaan darurat, mendistribusikan pakaian, makanan, menawarkan dukungan kesehatan, dan memulai proyek jangka panjang yaitu sekarang menjadi sponsorsip bagi program yatim piatu 'One-to-One' (History | Islamic Relief Worldwide).

Sebagai lembaga yang bergerak dalam misi kemanusiaan, Islamic Relief Worldwide juga mempunyai nilai-nilai yang menjadi landasan dalam aksinya yaitu berdasarkan Qur'an dan Sunnah. Nilai-nilai yang dipegang Islamic Relief antara lain; Ikhlas (Sincerity), Ihsan (Excellence), Rahma (Compassion), Adil (Social Justice), Amanah (Custodianship). Nilai-nilai inilah yang menjadi pedoman bagi Islamic Relief untuk bergerak memberi bantuan kepada siapapun yang membutuhkan tanpa memandang ras, agama maupun jenis kelamin. Bantuan pun ditujukan kepada para korban bencana seperti kekeringan, gempa bumi, banjir, longsor bahkan konflik yang sangat membutuhkan bantuan darurat. Disamping itu, Islamic Relief juga memberi bantuan dalam jangka panjang dengan tujuan agar tidak hanya membantu korban untuk bertahan hidup tapi juga membangun kembali hidup mereka di masa depan. Lalu Islamic Relief membuka lebih dari 100 kantor di 40 negara di seluruh dunia dari Afghanistan hingga Albania, Pakistan hingga Palestina, Somalia hingga Sudan. Serta bantuan bencana, Islamic Relief melakukan pekerjaan pembangunan berkelanjutan untuk menyediakan air, makanan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan dalam jangka panjang. Kami juga bekerja untuk mendukung anak yatim dan anak-anak, membantu orang mendapatkan pekerjaan dan membangun mata pencaharian untuk mendukung keluarga mereka, dan melindungi komunitas yang rentan dari bencana di masa depan, mencegah korban jiwa dan harta benda (Our History).

Latar belakang konflik Myanmar

Penyangkalan atas kewarganegaraan atau *stateless persons* terhadap masyarakat Rohingya merupakan dasar atas pelanggaran-pelanggaran HAM yang mereka alami di Myanmar yang membuat mereka menjadi sasaran dari serangkaian peraturan yang diskriminatif dan negara memilih untuk bersikap acuh. Bahkan Presiden Myanmar Thein Sein mengatakan bahwa “*rohingya are not our people and we have no duty to protect them*” dan Presiden Thein Sein menginginkan agar sebaiknya etnis rohingya ditampung atau dikelola saja oleh UNHCR atau negara ketiga yang ingin menampungnya (Susanti, 2014). Jika, dilihat dalam pasal 3 Burma Citizenship Law 1982 yang dinyatakan sebagai berikut (Ali):

“Nationals such as the Kachin, Kayah, Karen, Chin, Burman, Mon, Rakhine or Shan and ethnic groups as have settled in any of the territories included within the state as their permanent home from period anterior to 1185 B.C., 1823 A.D. are Burma Citizens.”

Lebih dari itu, eksistensi etnis bernama Rohingya tak diakui baik oleh kaum Buddhis nasionalis maupun pemerintah Myanmar. Bagi mereka, tidak ada etnis bernama “Rohingya”, yang ada adalah kaum Muslim Bengal. Maka Undang Undang Kewarganegaraan 1982 tersebut memperjelas secara resmi bahwa kedudukan Etnis Rohingya merupakan etnis yang tak diakui oleh Negara Myanmar. Hal ini membuat Etnis Rohingya semakin tertindas karena menjadi sasaran pembersihan etnis dari berbagai pihak. Special Rapporteur PBB untuk Hak Asasi Manusia di Burma menyatakan bahwa Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 telah melanggar norma-norma internasional yang telah disepakati bersama untuk meyakini bahwa tidak ada negara yang boleh menyetujui diskriminasi berdasarkan keagamaan dan etnis (Human Rights Watch, 2009).

Kehidupan sehari-hari Rohingya seketika menjadi lebih buruk. Mereka menghadapi pembatasan keras terhadap gerakan mereka dan menjadi sasaran kerja paksa dan perampasan tanah secara sewenang-wenang dan pemindahan paksa, serta menanggung pajak dan pemerasan yang berlebihan. Sejak 1994, telah ilegal bagi

Rohingya yang sudah menikah untuk memiliki lebih dari dua anak. Maka sejak saat itu banyak ibu yang melakukan aborsi karena tekanan pemerintah tersebut.

Kondisi ini telah menimbulkan kerugian pada masyarakat Rohingya, ratusan rumah telah dibakar dan dihancurkan, begitu juga dengan korban jiwa yang terbunuh. Penyiksaan pun terus mereka terima tanpa akhir setiap waktunya hingga puncaknya pada tahun 2012. Dimana pada Mei 2012, terjadi sebuah kejadian yang meyerupai konflik besar-besaran antara etnis Rakhine dan etnis Rohingya yang berujung pada penyiksaan terhadap etnis Rohingya dan menyebabkan banyak korban berjatuhan.

Tragedi tersebut bermula dari tuduhan pembunuhan yang dilakukan oleh beberapa pria dari etnis Rohingya terhadap seorang gadis Rakhine bernama Ma Thida Htwe. Beberapa isu buruk berkembang luas di masyarakat Rakhine sehingga memicu kemarahan terhadap etnis Rohingya. Situasi pun semakin buruk ketika beredarnya foto forensik jasad gadis tersebut yang menunjukkan metode pembunuhan yang dilakukan oleh pria Rohingya tersebut. Foto tersebut pun membakar amarah warga. Setelah itu lebih dari seribu massa marah dan hampir menghancurkan kantor polisi di mana tiga pelaku ditangkap. Lalu kasus terburuk dan pemicu tragedi Rohingya adalah pembantaian terhadap 10 orang Muslim peziarah yang ada dalam sebuah bus di Taunggy dalam perjalanan dari Sandoway ke Rangoon pada tanggal 4 Juni. Aksi ini disinyalir sebagai balas dendam yang berlebihan dan sistematis terhadap kasus perkosaan sebelumnya yang kebenarannya juga masih dipertanyakan. Kejadian tersebut pun semakin memperuncing ketidaksukaan mereka terhadap etnis Rohingya. Kekejaman terhadap etnis Rohingya semakin sering dilakukan dengan dalih baru yang seolah membenarkan tindakan mereka.

Konflik sejak insiden 10 orang Muslim terbunuh terus memanas di kawasan Arrakan, Burma, muslim Rohingya menjadi sasaran. Konflik ini kemudian berlanjut di tahun-tahun berikutnya, termasuk serangkaian aksi kekerasan Buddha–Muslim belakangan ini, telah menyebabkan ribuan orang tewas, ratusan ribu warga mengungsi, ribuan rumah hangus terbakar, dan tak terhitung lagi berapa nilai properti yang hancur-lebur berantakan dimusnahkan oleh massa yang sedang emosi, marah dan kalap (Qurtuby, 2017).

Kondisi ini telah menimbulkan kerugian pada masyarakat Rohingya, ratusan rumah telah dibakar dan dihancurkan, begitu juga dengan korban jiwa yang terbunuh, kondisi seperti inilah yang menghancurkan mereka untuk pindah dan mencari tempat yang lebih aman bagi mereka untuk melanjutkan hidupnya, sehingga muncul istilah “manusia perahu” karena mereka menghabiskan masa hidupnya di atas perahu yang diharapkan akan

Pembahasan

NGO (*Non Governmental Organisation*)

Dalam Hubungan Internasional terdapat aktor-aktor yang berperan dalam interaksi Dunia Internasional. Aktor dalam Hubungan Internasional sendiri dibedakan menjadi dua bagian yaitu aktor negara (*State actor*) dan aktor non-negara (*Non-state actor*). Aktor negara terdiri dari negara itu sendiri sedangkan aktor non-negara terdiri dari *inter-governmental organizations (IGOs)* atau organisasi antar pemerintah, *non-governmental organizations (NGOs)* atau organisasi non-pemerintah, *Multinational Corporations (MNC)* atau perusahaan multinasional dan individu yang berpengaruh.

Salah satu aktor Internasional dalam Hubungan Internasional yang sangat berpengaruh dewasa ini adalah *Non-governmental Organizations (NGO)*. NGO kini mempunyai peran yang penting di tengah banyaknya isu-isu kontroversial yang kian beragam tiap waktunya. Sehingga keberadaan NGO cukup diperhatikan oleh berbagai pihak dan dianggap sangat membantu persoalan-persoalan Internasional yang tidak bisa diatasi oleh aktor negara maupun aktor lainnya yang terkait dengan negara.

NGO adalah Aktor Hubungan Internasional yang bersifat independen dan mempunyai nilai-nilai sosial dalam visi misinya. Keberadaannya yang tidak terikat dengan negara menjadikannya lebih leluasa dalam pergerakannya. Anggota NGO sendiri berasal dari kalangan masyarakat umum dengan berbagai profesi yang memperjuangkan hal-hal tertentu sehingga melahirkan berbagai NGO dengan fokus tujuan tertentu yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Namun biasanya NGO memperjuangkan sesuatu yang bersifat sosial. Terkadang NGO pun berperan dalam menjadi jembatan antara pemerintah dengan masyarakat dalam menghadapi isu-isu dalam sebuah negara maupun skala internasional.

Berdasarkan aktivitas utamanya, NGO dibagi menjadi dua kategori yaitu operasional dan advokasi (Hildy Teegen, 2004). Yang dimaksud dengan operasional adalah NGO yang menyediakan barang dan jasa bagi 'klien' yang membutuhkan. NGO Operasional tujuan utamanya adalah perancangan dan implementasi proyek pengembangan. Kelompok ini menggerakkan sumber daya dalam bentuk keuangan, material atau tenaga relawan, untuk menjalankan proyek dan program mereka.

Sementara NGO advokasi adalah NGO yang bekerja sebagai representasi dari masyarakat yang tidak memiliki suara atau akses untuk mempromosikan kepentingan mereka. NGO Advokasi tujuan utamanya adalah mempertahankan atau memelihara suatu isu khusus dan bekerja untuk mempengaruhi kebijakan dan tindakan pemerintah untuk atau atas isu itu. Berlawanan dengan manajemen proyek operasional, organisasi ini pada dasarnya berusaha untuk meningkatkan kesadaran (*awareness*) dan pengetahuan dengan melakukan lobi, kegiatan pers dan kegiatan-kegiatan aktivis.

Maka sesuai dari spesifikasi NGO diatas, Islamic Relief Worldwide masuk dalam kategori NGO operasional karena melakukan upaya pemberian bantuan kemanusiaan terhadap daerah dan orang-orang yang menjadi korban kemanusiaan. Bahkan program bantuan dari Islamic Relief Worldwide kini telah berkembang menjadi program Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*) terhadap daerah-daerah terdampak. Salah satu kegiatan sosialnya adalah partisipasi Islamic Relief dalam membantu korban terdampak konflik di Myanmar khususnya terhadap etnis Rohingya. Islamic Relief telah ikut andil dalam membantu etnis Rohingya sejak tahun 2012. Berbagai program kemanusiaan pun telah dilaksanakan guna membantu para etnis Rohingya yang telah menjadi korban sejak berpuluh tahun lalu. Upaya bantuan terhadap pemukiman etnis Rohingya untuk membantu membangun kembali kesejahteraan dan memberikan rasa aman pada daerah konflik menjadi tujuan utama pada setiap programnya.

Aksi kemanusiaan atau Humanitarisme (*Humanitarian Action*)

Konsep ini berasal dari berabad-abad lalu ketika masyarakat sudah mulai menerapkan kegiatan amal dan filantropi sebagai aktivitas budaya dan agama mereka dengan tujuan masing-masing. Yang kemudian menjadi kebiasaan yang melekat pada

tiap orang. Namun pada abad ke-19 banyak bermunculan gerakan-gerakan kemanusiaan di berbagai belahan dunia terutama di wilayah barat. Fenomena tersebut menciptakan Sistem Humanitarian Moderen. Kemudian pada tahun 1859 terjadi perang Solferino yang cukup hebat. Jean Henry Dunant sangat kaget melihat parahnya dampak dari pertempuran tersebut yang menyisakan banyak korban dan kondisi yang mengenaskan. Hal tersebut membuat Jean berinisiatif untuk memberikan bantuan terhadap korban perang bersama penduduk setempat. Kemudian Jean menuliskan sebuah buku yang berjudul *Memory of Solferino* dan lahirlah sebuah konsep Aksi Kemanusiaan atau Humanitarianisme. Lalu Konsep ini pula yang menjadi cikal bakal dari lahirnya sebuah NGO kemanusiaan yang kini menjadi garda terdepan dalam aksi kemanusiaan di dunia yaitu *International Committee of the Red Cross (ICRC)*.

Nilai-nilai yang mendasari prinsip-prinsip kemanusiaan seperti amal, kasih sayang, belas kasihan dan penghormatan terhadap kehidupan dan martabat manusia selalu hadir di semua masyarakat dan agama (sedekah dalam Kristen, *dāna* dalam Hinduisme, Buddhisme, Jainisme dan Sikhisme, zakat dalam Islam, *tzedakah* dalam Yudaisme dan lain-lain) dan menembus berbagai masalah kehidupan: misalnya, kebutuhan untuk memberikan perawatan medis sesuai kebutuhan dan tanpa diskriminasi apapun diabadikan dalam etika kedokteran. (*International Review of the Red Cross*, 2016)

Kemudian berdasarkan nilai-nilai diatas maka terbentuklah empat prinsip Fundamental yang menjadi acuan utama aksi kemanusiaan para aktor Hubungan Internasional. Keempat prinsip tersebut antara lain: (Salgado, *The State of Art of Humanitarian Action*, 2003)

1. Kemanusiaan (*Humanity*)

Penderitaan manusia pasti terjadi diringankan dimanapun itu terjadi. Tujuan aksi kemanusiaan adalah untuk melindungi kehidupan dan kesehatan sementara memastikan rasa hormat terhadap manusia makhluk dan ini seharusnya menjadi motivasi miliknya.

2. Ketidakberpihakan (*Impartiality*)

Aksi kemanusiaan harus dilakukan sesuai kebutuhan, memprioritaskan pada kasus-kasus mendesak dan tanpa membedakan kewarganegaraan, ras, jenis kelamin, keyakinan agama, kelas, politik pendapat atau lebih jauh diskriminasi.

3. Kenetralan (*Neutrality*)

Aktor kemanusiaan seharusnya tidak ambil bagian dalam permusuhan atau terlibat dalam politik, ras, religius atau ideologis kontroversi.

4. Kemerdekaan (*Independence*)

Aksi harus tetap bebas dari unsur politik, ekonomi, militer atau pengaruh aktor kemanusiaan yang kompromi kemampuan untuk bertindak sesuai dengan intinya prinsip.

Islamic Relief Worldwide adalah Organisasi kemanusiaan Islam yang memperjuangkan terpenuhinya hak-hak sosial tiap orang sebagai respon atas kepedulian terhadap penderitaan orang lain. Keempat Prinsip diatas pun telah menjadi pedoman bagi pergerakan Organisasi Islamic Relief Worldwide dalam melakukan aksi kemanusiaannya. Dengan menggunakan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan pergerakannya, Islamic Relief merumuskan nilai-nilai tersebut dalam Lima (5) Prinsip, yaitu Ikhlas (*Sincerity*), Ihsan (*Excellence*), Rahma (*Compassion*), Adil (*Social Justice*), Amanah (*Custodianship*) (Islamic Relief Worldwide, 2014).

Islamic Relief Worldwide pun mengaplikasikan 5 konsep prinsipnya dalam membantu korban dari konflik Myanmar khususnya etnis Rohingya. Sebagai bentuk kepedulian terhadap krisis kemanusiaan yang menimpa Negara Myanmar terutama terhadap etnis Rohingya, Islamic Relief telah memberikan bantuan kemanusiaan sejak tahun 2012 lalu. Bantuan tersebut ditujukan kepada korban-korban yang membutuhkan tanpa memandang ras, agama, baik warna kulit. Selain itu Islamic Relief juga turut membantu Lembaga Swadaya Masyarakat setempat dengan menyediakan peralatan kebersihan, perlengkapan sekolah, tempat penampungan korban dan perabotan. Pemberian bantuan tersebut terus berlanjut meski banyak hambatan yang membatasi upaya bantuan mereka. Hingga ketika konflik di daerah Rakhine semakin memuncak dan menyebabkan banyak korban berjatuhan, maka Islamic Relief pun semakin gencar memberikan bantuan tanggap darurat berupa tempat penampungan, pemasangan sumur, kamar kecil dan distribusi makanan. Dan yang terbaru Islamic Relief telah

mencanangkan program pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) untuk etnis Rohingya.

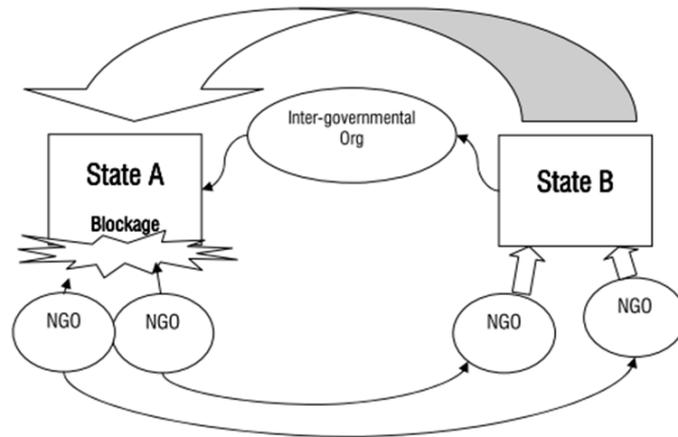
Transnational Advocacy Network (TAN)

Konsep *Transnational Advocacy Network (TAN)* menurut Margareth Keck dan Kathryn Sikkink adalah aktor-aktor yang bekerja dalam skala internasional pada suatu isu, aktor-aktor ini disatukan oleh nilai-nilai bersama dan wacana bersama, serta memiliki intensitas yang padat dalam pertukaran informasi dan jasa (Keck & Sikkink, 1999). Menurut Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink, *Transnational Advocacy Networks* muncul karena keadaan dan kondisi tertentu yaitu:

1. Terhambatnya atau terputusnya sebuah struktur yang menghubungkan antara kelompok lokal dan pemerintahan, dimana dengan adanya struktur penghubung yang kurang baik maka menimbulkan keadaan yang kurang efektif dalam memecahkan masalah, sehingga muncul situasi boomerang pattern yang mempengaruhi karakteristik dari jaringan tersebut.
2. Aktivis atau aktor politik yang percaya bahwa jaringan yang ada dapat memajukan misi-misi dan kampanye mereka, serta secara aktif mempromosikan mereka.
3. Adanya konferensi internasional dan berbagai bentuk interaksi internasional yang memberikan wadah untuk membentuk dan menguatkan jaringan.

Dalam konsep *Transnational Advocacy Network* terdapat tujuh aktor utama yang mampu memberikan kontribusi, yaitu (1) NGO (*Non-Governmental Organization*) lokal dan internasional baik peneliti maupun organisasi advokasi, (2) gerakan sosial lokal, (3) yayasan, (4) media, (5) organisasi keagamaan, serikat buruh, pelanggan organisasi dan para intelektual, (6) bagian dari organisasi antarpemerintah baik regional maupun internasional, (7) serta badan eksekutif atau parlemen dari suatu pemerintahan. Tidak perlu semua aktor-aktor tersebut untuk membentuk sebuah Jaringan Advokasi Transnasional, hanya dengan terdiri dari beberapa aktor saja, jaringan tersebut sudah dapat terbentuk dan dapat berjalan. Pemerintah, pelaku aktivitas serta local social movements merupakan aktor yang memiliki peran paling besar menurut konsep *Transnational Advocacy Network*, sedangkan aktor-aktor TAN sering kali memiliki

gangguan untuk masuk ke dalam arena politik domestik sebuah negara. Karena itulah mereka menggunakan koneksi dari jaringan internasional untuk membantu tentang persoalan yang sedang dihadapi, dari situlah akan terbentuk pola hubungan yang disebut oleh Keck dan Sikkink sebagai *Boomerang pattern*.



Gambar 1.1. Model Boomerang Pattern

Menurut Margareth E. Keck dan Kathryn Sikkink, *Boomerang Pattern* adalah sebuah pola ketika NGO melakukan sebuah advokasi dan upaya itu tidak berhasil, baik itu karena negara tersebut enggan untuk melakukan perubahan seperti yang diinginkan NGO itu atau karena alasan lain, NGO tersebut mencari jalan pintas dengan membangun jejaring advokasi di negara lain. Hubungan yang terjalin biasanya antara NGO di Negara berkembang dengan negara atau NGO di negara maju, dengan harapan negara atau NGO tersebut bisa menekan negara yang dimaksud bisa melalui organisasi internasional atau menekan secara langsung.

Untuk mencapai tujuan dari pergerakan, terdapat 4 startegi yang digunakan, yaitu:

1. *Information politics*, kemampuan untuk mentransfer dengan cepat informasi politik yang berguna dan memiliki kredibilitas atau dapat dipercaya, ke tempat yang akan mendapatkan pengaruh yang paling kuat.
2. *Symbolic politics*, kemampuan dalam memberikan kesan yang kuat melalui simbol, aksi, ataupun cerita yang akan menggambarkan situasi ataupun tuntutan, meskipun sasaran individu tersebut berada di jarak yang jauh.
3. *Leverage politics*, kemampuan untuk menggambarkan situasi dimana aktor yang

memiliki power dapat mengendalikan situasi dan berpengaruh, sedangkan aktor yang tidak memiliki power terlihat tidak memiliki pengaruh.

4. *Accountability politics*, usaha yang digunakan dengan membantu aktor-aktor yang mempunyai kekuatan untuk bertindak atau beraksi dalam kebijakan atau prinsip yang mereka sokong.

Maka dengan konsep *Transnational Advocacy Network* ini dapat dilihat upaya yang telah dilakukan oleh Islamic Relief guna mencapai tujuan mereka. Dalam hal ini, Islamic Relief turut menerapkan strategi pada konsep TAN yaitu *Information Politics*. Islamic Relief bergabung dalam forum INGO yang mana bertujuan untuk mempengaruhi dan meningkatkan keefektifan dan koherensi kemanusiaan, bantuan pembangunan Negara Myanmar. Hal ini dilakukan dengan mengeksplorasi peluang untuk mengembangkan dan memperkuat kebijakan dan praktik terbaik melalui berbagi informasi yang terkoordinasi, memfasilitasi dialog dan keterlibatan konstruktif dengan pengambil keputusan nasional dan internasional yang terlibat dalam kegiatan kemanusiaan dan pembangunan, dengan demikian mendukung lingkungan yang mendukung untuk LSM internasional agar menjadi lebih baik mencapai tujuan mereka.

Dalam strategi *Leverage Politics*, Islamic Relief telah bekerjasama dengan lembaga independen dan kemanusiaan lokal *Myanmar Heart Development Organization* untuk membantu menyalurkan bantuan ke daerah di luar jangkauan atas nama Islamic Relief. Selain itu Islamic Relief telah juga bekerja sama dengan UNHCR (Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi) yang tentu mempunyai akses lebih besar untuk membantu pengungsi internal yang menghadapi kerawanan dan membutuhkan bantuan pangan besar-besaran akibat genosida. Staf lokal Islamic Relief bekerja keras untuk mendapatkan akses ke semua komunitas yang membutuhkan secepat mungkin, bertemu dengan pejabat dari UNOCHA dan Oxfam serta pemerintah lokal.

Respon Islamic Relief Worldwide terhadap Konflik Myanmar

etnis Rohingya telah menerima perlakuan diskriminasi sejak dahulu dan terus berlangsung hingga puncaknya konflik pada tahun 2102 kemarin. Konflik mengerikan ini diawali dengan terungkapnya peristiwa pembunuhan disertai pemerkosaan kepada

seorang gadis Rakhine yang dilakukan tiga orang pria etnis Rohingya. Pembunuhan keji itu menyulut kemarahan massa yang kemudian dengan marah menyerbu sebuah bus yang berisi 10 muslim didalamnya dan membunuh mereka. Kemudian penyiksaan yang banyak memakan korban dari etnis Rohingya ini terus berlangsung bahkan semakin menjadi-jadi. Konflik ini terdiri dari penyiksaan, pembakaran dan perusakan rumah serta fasilitas umum, diskriminasi, pembatasan gerak, pemerkosaan hingga pembunuhan. Hal ini mengakibatkan hilangnya ribuan nyawa dan menyisakan ribuan lainnya hidup dalam trauma dan ketakutan.

Mengetahui kejadian tersebut, seketika dunia pun gempar. Seluruh perhatian pun tertuju kepada etnis Rohingya dan sedikit demi sedikit banyak fakta yang terus muncul di permukaan. Beragam simpati pun mengalir dan berbagai pihak ikut turun ke daerah konflik baik untuk memberi bantuan maupun untuk mencari tau tentang kejadian sebenarnya. Peristiwa tersebut juga sangat menarik perhatian Islamic Relief yang notabene-nya sebagai NGO kemanusiaan.

Upaya Islamic Relief dalam Membantu Etnis Rohingya

Krisis kemanusiaan di Rakhine semakin pelik dan kondisi etnis Rohingya pun makin memprihatinkan. Hari-hari di Rakhine sangat buruk melihat keadaan mereka yang sangat membutuhkan bantuan darurat untuk bisa hidup hari ini maupun untuk keberlangsungan hidup selanjutnya. Situasi yang sama mengerikan juga terjadi para pengungsi yang melarikan diri dari Myanmar, dimana di perjalanan mereka mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang tak layak serta di tempat pengungsian mereka pun mendapat bantuan yang sangat minim. Beberapa tempat mereka mendarat bahkan sampai mengusir dan menelantarkan mereka. Sehingga segala cara untuk menggapai kesejahteraan pun tampak buruk bagi mereka.

Sebagai Organisasi kemanusiaan, Islamic Relief pun mengaplikasikan langsung 5 prinsipnya dalam membantu etnis Rohingya pada konflik Myanmar. 5 prinsip Islamic Relief antara lain: Ikhlas (*Sincerity*), Ihsan (*Excellence*), Rahma (*Compassion*), Adil (*Social Justice*), Amanah (*Custodianship*) (Islamic Relief Worldwide, 2014).

Sebagai bentuk kepedulian terhadap krisis kemanusiaan yang menimpa Negara Myanmar terutama terhadap etnis Rohingya, Islamic Relief telah melakukan upaya

pemulihan dengan memberikan bantuan kemanusiaan sejak tahun 2012 lalu. Bahkan Islamic Relief telah bergabung membantu Myanmar sejak 2008 ketika terjadi Topan Nergis. Bantuan tersebut diberikan kepada seluruh korban yang membutuhkan tanpa memandang ras, agama, baik warna kulit. Pemberian bantuan tersebut terus berlanjut meski banyak hambatan yang membatasi upaya bantuan mereka. Hingga ketika konflik di daerah Rakhine semakin memuncak dan menyebabkan banyak korban berjatuhan, maka Islamic Relief pun semakin gencar memberikan bantuan tanggap darurat berupa tempat penampungan, pemasangan sumur, kamar kecil dan distribusi makanan. Bantuan Islamic Relief berfokus kepada etnis Rohingya yang mengalami dampak dari krisis kemanusiaan seperti isolasi ekonomi, sulitnya akses bantuan dan perusakan tempat tinggal serta fasilitas lainnya.

Strategi Penyaluran Bantuan terhadap Krisis Kemanusiaan Rohingya

Daerah konflik yang bahkan melibatkan pemerintah umumnya sangat sulit untuk dimasuki pihak dari luar. Entah memang kondisi di lapangan yang mencekam dan tak layak untuk dimasuki atau ada kebijakan pemerintah yang tak ingin ada campur tangan dari luar. Sama halnya yang terjadi pada konflik Myanmar yang pecah di daerah Rakhine. Pemerintah Myanmar beberapa kali memperketat akses masuk dan membatasi NGO bahkan bantuan ke daerah konflik. Islamic Relief pun ikut merasakan kesulitan yang sama sejak awal-awal kedatangan mereka.

Maka dengan konsep *Transnational Advocacy Network* ini dapat dilihat upaya yang telah dilakukan oleh Islamic Relief guna mencapai tujuan mereka. Dalam hal ini, Islamic Relief turut menerapkan strategi pada konsep TAN yaitu *Information Politics*. Islamic Relief bergabung dalam forum INGO yang mana bertujuan untuk mempengaruhi dan meningkatkan keefektifan dan koherensi kemanusiaan, bantuan pembangunan Negara Myanmar. Hal ini dilakukan dengan mengeksplorasi peluang untuk mengembangkan dan memperkuat kebijakan dan praktik terbaik melalui berbagi informasi yang terkoordinasi, memfasilitasi dialog dan keterlibatan konstruktif dengan pengambil keputusan nasional dan internasional yang terlibat dalam kegiatan kemanusiaan dan pembangunan, dengan demikian mendukung lingkungan yang mendukung untuk LSM internasional agar menjadi lebih baik mencapai tujuan mereka.

Dalam strategi *Leverage Politics*, Islamic Relief telah bekerjasama dengan lembaga independen dan kemanusiaan lokal *Myanmar Heart Development Organization* untuk membantu menyalurkan bantuan ke daerah di luar jangkauan atas nama Islamic Relief. Selain itu Islamic Relief telah juga bekerja sama dengan UNHCR (Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi) yang tentu mempunyai akses lebih besar untuk membantu pengungsi internal yang menghadapi kerawanan dan membutuhkan bantuan pangan besar-besaran akibat genosida. Staf lokal Islamic Relief bekerja keras untuk mendapatkan akses ke semua komunitas yang membutuhkan secepat mungkin, bertemu dengan pejabat dari UNOCHA dan Oxfam serta pemerintah lokal.

Bantuan Islamic Relief dalam Krisis Kemanusiaan Etnis Rohingya

Negara Myanmar telah menjadi tempat Islamic Relief bekerja sejak 2008. Islamic Relief juga kerap menyerukan kepada pemerintah dan masyarakat untuk memulihkan perdamaian dan keamanan, serta memastikan perlindungan lokal orang dan pekerja bantuan. Saat konflik meletus di Rakhine State pada tahun 2012, Islamic Relief langsung merespon dengan memberikan bantuan darurat. Islamic Relief menyediakan lebih dari 6.100 paket makanan untuk orang Muslim yang rentan dan Komunitas Buddis yang menjadi koban konflik, dan membangun fasilitas penting bagi orang-orang yang terlantar diselenggarakan di desa Pwe Ra Gon dan Ywa Thit. Islamic Relief juga membantu orang yang tinggal di kamp Syi Tha Mar Gyi di Sittwe untuk membangun gedung tempat penampungan, sumur tabung, fasilitas mandi dan kakus.

Hingga kini Islamic Relief terus bekerja bersama mitra lokal untuk membantu para korban terdampak. Islamic Relief menyediakan makanan, tempat tinggal, sumur, jamban dan toilet untuk lebih dari 120.000 orang terlantar yang hidup dalam kondisi sulit di 18 kamp di ibukota negara bagian, Sittwe. Islamic Relief juga meningkatkan dukungan kami di kamp-kamp yang ada karena bantuan makanan telah berkurang, sebagai akibat dari konflik baru di Rakhine utara, karena prioritas dan masalah akses yang berbeda. Islamic Relief baru saja menyelesaikan pembangunan 110 tempat penampungan masing-masing menyediakan ruang hidup terpisah untuk delapan keluarga dan rencana kami adalah untuk membangun hingga 300, memungkinkan 12.000 orang untuk hidup dengan baik. Islamic Relief juga menyediakan 20 sumur

tabung dengan pompa tangan untuk menyediakan air bersih di kamp-kamp. Dan menyediakan makanan untuk 535 keluarga yang baru dipindahkan di kota Sittwe (Islamic Relief, 2017).

Kesimpulan

Berbagai hambatan turut diterima oleh Islamic Relief saat ingin menyalurkan bantuan ke daerah terdampak. Maka Islamic Relief turut menerapkan strategi pada konsep *Transnational Advocacy Network* (TAN) dalam membantu krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya. yaitu *Information Politics* dan *Leverage Politics*. Islamic Relief bergabung dalam forum INGO yang mana bertujuan untuk mengeksplorasi peluang guna mengembangkan dan memperkuat kebijakan. Bergabungnya Islamic Relief ini pun berguna untuk mengetahui praktik terbaik melalui berbagi informasi yang terkoordinasi, memfasilitasi dialog dan keterlibatan konstruktif dengan pengambil keputusan nasional dan internasional. Yang mana kebijakan ini nantinya terlibat dalam kegiatan kemanusiaan dan pembangunan, dengan demikian mendukung lingkungan yang mendukung untuk LSM internasional agar menjadi lebih baik mencapai tujuan mereka. Islamic Relief juga telah bekerjasama dengan lembaga independen dan kemanusiaan lokal Myanmar yaitu *Myanmar Heart Development Organization*. Selain itu Islamic Relief telah juga bekerja sama dengan UNHCR (Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi) yang tentu mempunyai akses lebih besar untuk membantu pengungsi internal yang menghadapi kerawanan dan membutuhkan bantuan pangan besar-besaran akibat genosida. Untuk meningkatkan penyaluran bantuan, Islamic Relief berkerjasama dengan PULSE Bangladesh yang sudah disetujui oleh otoritas Bangladesh untuk bekerja dalam krisis saat ini di kamp-kamp Bazar Cox.

Islamic Relief Worldwide pun mengaplikasikan langsung 5 konsep prinsipnya dalam membantu menyelesaikan konflik Myanmar tersebut. Sebagai bentuk kepedulian terhadap krisis kemanusiaan yang menimpa Negara Myanmar terutama terhadap etnis Rohingya, Islamic Relief telah melakukan upaya pemulihan dengan memberikan bantuan kemanusiaan sejak tahun 2012 lalu. Bahkan Islamic Relief telah bergabung membantu Myanmar sejak 2008 ketika terjadi Topan Nergis. Bantuan tersebut diberikan

kepada seluruh korban yang membutuhkan tanpa memandang ras, agama, baik warna kulit. Pemberian bantuan tersebut terus berlanjut meski banyak hambatan yang membatasi upaya bantuan mereka. Bantuan Islamic Relief berfokus kepada etnis Rohingya yang mengalami dampak dari krisis kemanusiaan seperti isolasi ekonomi, sulitnya akses bantuan dan perusakan tempat tinggal serta fasilitas lainnya.

Sejauh ini, Islamic Relief telah banyak melakukan aksi kemanusiaan dalam membantu pemulihan kesejahteraan etnis Rohingya yang selaras nilai-nilai Islam yang mereka terapkan. Berbagai bantuan disalurkan baik secara langsung maupun melalui kantor cabang yang berada di berbagai negara. Segala cara dan upaya pun dilakukan untuk dapat membantu krisis kemanusiaan Etnis Rohingya secara maksimal.

Referensi

Buku, Jurnal dan Website

- Ali, Y. A. (t.thn.). *Rohingya The Rejected People*. Dipetik Agustus 1, 2018, dari <http://www.globalminorities.co.uk/gmareports/rohingya-burma>
- Alternative ASEAN Network on Burma. (2006). *Campaigns, Advocacy, an Capacity-Building for Human Rights & Democracy*. Bangkok.
- Amnesty International. (2004). *Myanmar.The Rohingya Minority: Fundamental Rights Denied*. UNITED KINGDOM.
- Bhawono, A. (2017, September 2017). *Sejarah Rohingya, Duka Warga Tanpa Negara*. Dipetik Oktober 19, 2017, dari detiknews: <https://news.detik.com/read/2017/09/04/104828/3627291/1148/sejarah-rohingya-duka-warga-tanpa-negara>
- Hildy Teegen, J. P. (2004). The Importance of Non-governmental Organizations (NGOs) in Global Governance and Value Creation: An International Business Research Agenda. *Journal of International Business Studies*, 463-465.
- History | Islamic Relief Worldwide*. (t.thn.). Dipetik Oktober 17, 2017, dari www.islamic-relief.org: <http://www.islamic-relief.org/about-us/history/>
- Human Rights Watch. (2009). *Perilous Plight*. 112.
- Human Rights Watch/Asia. (1996, September). *BURMA. THE ROHINGYA MUSLIMS. Ending a Cycle of Exodus?* Dipetik Oktober 11, 2017, dari reliefweb.int: <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/burma969.pdf>
- International Review of the Red Cross. (2016). *Principles guiding humanitarian action*.
- Islamic Relief Worldwide. (2014, Juni). *Welcome to Islamic Relief*. Dipetik Oktober 12, 2017, dari [Welcome to Islamic Relief](http://www.islamic-relief.org/publications/): <http://www.islamic-relief.org/publications/>
- Keck, M. E., & Sikkink, K. (1999). *Transnational Advocacy Network in International and Regional Politics*. 89.

- Milner, K. (2000, 6 April Kamis). *news.bbc.co.uk*. Dipetik Juni 20, 2018, dari <http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/703958.stm>
- Myanmar*. (t.thn.). Dipetik Maret 02, 2018, dari <http://www.islamic-relief.org>:
<http://www.islamic-relief.org/category/where-we-work/myanmar/>
- Myanmar - Islamic Relief USA*. (t.thn.). Dipetik Maret 08, 2018, dari irusa.org:
<http://irusa.org/myanmar/>
- Nugroho, T. A. (2012, Agustus 09). *Analisis Politik Konflik Rohingya*. Dipetik Agustus 28, 2017, dari Kompasiana.com:
https://www.kompasiana.com/tommyajinugroho/analisis-politik-konflik-rohingya_5516ed5d813311f55cbc60ed
- Our History*. (n.d.). Retrieved Juli 22, 2018, from www.islamic-relief.org.uk:
<https://www.islamic-relief.org.uk/about-us/history/>
- Qurtuby, S. a. (2017 , 09 18). *Sejarah Kelam Muslim Rohingya* . Dipetik Juli 12, 2018, dari <https://www.dw.com/id/sejarah-kelam-muslim-rohingya/a-40557421>
- Salgado, R. G. (2003). *The State of Art of Humanitarian Action*. EUPRHA.
- Susanti, A. (2014). Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Terhadap Etnis Rohingya Di Myanmar Berdasarkan Hukum Internasional. *Jurnal Ilmiah*.